BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Faktor – faktor yang melatarbelakangi misi RMS

Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil usaha bersama dalam semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Hal ini membuktikan bahwa ketika Indonesia bersatu padu, tujuan bersama akan dapat diraih. Sebaliknya, apabila bangsa Indonesia bercerai-berai, Indonesia akan mudah dihancurkan. Perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan harus dikelola sebagai kekayaan dan pemersatu bangsa Indonesia.

Persatuan adalah suatu hal yang didamba seluruh rakyat. Jika dilihat dari luar, persatuan itu berkesan kokoh dan padu. Tapi, apabila ada sedikit gesekan dalam persatuan. Akan sangat mudah pula rasa toleransi dan kerukunan hilang dari masyarakat. Etnis, suku, dan agama adalah isu-isu yang sering didengungkan sebagai pemicu konflik. Banyak provokator baik dari dalam atau luar negeri yang ingin merusak persatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan slogannya Bhineka Tunggal Ika, berusaha mengintegrasikan pluralisme majemuk dalam tubuhnya. Diawali dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah cita-cita menjadikan bangsa Indonesia yang satu.

Indonesia dengan wilayah yang sangat luas serta terdiri atas pulau-pulau menuntut strategi pertahanan negara yang tepat untuk mengamankan wilayah tersebut. Karakteristik geografi yang tersusun dari gugusan kepulauan yang terletak di posisi

silang, dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, serta demografi yang majemuk mengandung tantangan yang sangat kompleks. Tugas melindungi dan mengamankan Indonesia dengan karakteristik yang demikian mengisyaratkan tantangan yang kompleks dan berimplikasi pada tuntutan pembangunan dan pengelolaan sistem pertahanan negara yang berdaya tangkal andal.

Dalam bidang pertahanan, terdapat sejumlah isu yang menonjol, di antaranya isu perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, separatisme, terorisme, konflik komunal yang bernuansa SARA, gerakan radikal yang anarkis, serta isu politik sebagai akibat dari reformasi yang tidak terkendali.

Gerakan separatis masih menjadi isu keamanan dalam negeri yang mengancam keutuhan wilayah NKRI dan mengancam wibawa pemerintah serta keselamatan masyarakat. Gerakan separatis di Indonesia dilakukan dalam bentuk gerakan separatis politik serta gerakan separatis bersenjata. Hingga kini masih terdapat potensi gerakan separatis di beberapa wilayah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan mengeksploitasi kelemahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Separatisme berasal dari kata “Separate” dan akhiran isme. Separate berasal dari kata bahasa inggris yang berarti memisahkan dan menjarakkan. Ini berarti adalah suatu perbuatan atau aksi memisahkan diri dari pusat. Sedangkan untuk isme adalah akhiran yang bermakna paham. Sehingga dapat diperoleh makna dari separatisme yaitu pandangan seseorang atau kelompok yang ingin memisahkan diri dari tempat asal sebelumnya atau dari pada induknya.Dari kata separatisme ini, dikenal juga istilah

Separatisme Politis. Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Jadi bisa disimpulkan bahwa kata separatisme identik dengan pemisahan wilayah.

Gerakan separatisme juga menimbulkan gangguan keamanan di dalam negeri, tidak saja mengancam keamanan dan keselamatan negara tetapi juga terhadap keselamatan umum masyarakat dengan melakukan perampokan, pembunuhan, dan penarikan pajak secara paksa. Adanya kelompok separatis di beberapa wilayah Indonesia merupakan bibit-bibit potensi ancaman yang selalu akan mengancam keutuhan wilayah NKRI, terlebih lagi karena akar masalah separatisme banyak dipicu oleh ketimpangan pada pemberian hak politik, ekonomi, serta keadilan kepada masyarakat sehingga menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat untuk berada dalam naungan NKRI akan terus menjadi potensi separatisme.

Pada tahun 1950, Dr. Chris Soumukil memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS). RMS kemudian menjadi momok separatis Indonesia, RMS telah banyak menimbulkan kontroversi baik itu bagi para proklamatornya maupun latar belakang dari berdirinya gerakan separatis ini. banyak latar belakang dibalik tumbuhnya gerakan RMS ini diantaranya faktor politik pemerintah yang sentralistik, Peran pemerintah yang mendominasi terhadap pemerintah daerah, bukan saja banyak sumber daya ekonomi yang tersedot ke pusat, tetapi juga konsentrasi perhatian dan komitmen pemerintah daerah lebih mendorong untuk menyenagkan pusat. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang masyarakat Maluku rasakan pada masa

penjajahan Belanda. Secara historis masyarakat Maluku dipengaruhi oleh konstruksi kolonialisme Belanda, Sejalan dengan politik memecah belah (*debvide et impera),* Belanda secara diskriminatif mendorong pembangunan pendidikan di Maluku Selatan Warga Kristen Maluku Selatan yang berpendidikan banyak yang terserap ke dalam birokrasi Belanda, sedangkan yang tidak berpendidikan bergabung dengan tentara kolonial Belanda. Sehingga membuat masyarakat Maluku pada waktu itu lebih nyaman dan makmur berada dibawah kepemimpinan Belanda.

Faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah adanya unsur SARA yang dimana berpangkal dari kepentingan politis suatu kelompok yakni FKM/RMS yang ingin memisahkan diri dari NKRI sehingga konflik ini meluas menjadi konflik SARA.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya separatisme. Faktor yang paling sering adalah ketimpangan antara pusat daerah. Ketimpangan ini bersumber dari masalah ekonomi yaitu distribusi pendapatan yang tidak merata. Di negara yang baru berkembang, pembangunan masih terpusat di kota-kota besar. Daerah sering merasa diperlakukan tidak adil dalam hal ini.

Ketimpangan pembagian kekuasaan juga mendorong terjadinya separatisme. Faktor ini terjadi di maluku dengan adanya Republik Maluku Selatan (RMS). Gerakan ini sudah bermula di Indonesia sejak tahun 1950 yaitu pada saat perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelumnya, Maluku tergabung dalam negara bagian Indonesia Timur (NIT). Kemudian digagas oleh Soumokil, menolak kembalinya ke bentuk negara

kesatuan. Mereka tidak ingin kekuasaan mereka berkurang dengan meleburnya NIT ke RI. Oleh karena itu, mereka memproklamasikan berdirinya RMS.

4.1.1 Faktor Historis

Dalam proses pembentukannya sampai pada proklamasi kemerdekaannya, gerakan separatis RMS banyak dipengaruhi oleh faktor sejarah diantaranya pengaruh yang ditimbulkan pada masa penjajahan Belanda, ketika pasukan Sekutu mendarat di Ambon dan mengambil kekuasaan dari Jepang, penduduk Ambon yang sebagian besar buta politik, menyambut pasukan Sekutu dan kembalinya kolonialisme Belanda. Dengan cepat Belanda menguasai dan mengendalikan pemerintahan, dan membentuk sistem pemerintahan federal yang merupakan pertama diterapkan di Indonesia. Bersama dengan beberapa kumpulan pulau-pulau lainnya terbentuk kelompok Maluku Selatan. Kemudian berkembang dengan pengadaan status otonomi dengan dibentuknya lembaga Zuis-Molukken Raad (ZMR) (Dewan Maluku Selatan).

Masyarakat Ambon Maluku Secara historis dipengaruhi oleh konstruksi politik kolonialisme Belanda dan masa Orde Baru. Daerah ini pernah dijadikan daerah jajahan dua negara Eropa, Portugis dan Belanda, namun Belandalah yang kemudian banyak memberi pengaruh karena berkuasa lebih dari empat abad. Sejalan dengan politik memecah belah (*debvide et impera),* Belanda secara diskriminatif mendorong pembangunan pendidikan di Maluku Selatan yang mayoritas Kristen. Warga Kristen Maluku Selatan yang berpendidikan banyak yang terserap ke dalam birokrasi Belanda,

sedangkan yang tidak berpendidikan bergabung dengan tentara kolonial Belanda. (Richard Chauvel 1990)

Apa yang masyarakat Maluku dapatkan pada masa penjajahan Belanda sangat berbeda dengan apa yang mereka dapatkan dibawah payung kepemimpinan Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia yang cenderung sentralistik membuat sebagian masyarakat Maluku lebih merasa sejahtera dan makmur dibawah kepemimpinan kolonial Belanda baik dalam kedudukan sosial maupun pembangunan politik dan ekonomi, hal tersebutlah yang membuat muncul Ideologi separatisme yakni memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4.1.2 Faktor Sentralisasi Pemerintahan

Selain faktor historis yang ikut mempengaruhi terbentuknya gerakan separatis RMS yang telah penulis coba jelaskan diatas, adapun faktor lain yang ikut mempengaruhi yaitu faktor sentralisasi pemerintahan yang juga berdampak pada terbentuknya gerakan separatis RMS. Berbeda dengan faktor historis dimana negara lain coba menanamkan kekuasaan dan pengaruhnya untuk meruntuhkan rasa nasionalisme sebagian rakyat Maluku dengan membentuk Republik Maluku Selatan (RMS), namun faktor sentralisasi pemerintahan muncul dari pemerintah indonesia sendiri dengan sistem pembangunan dan ekonomi yang terpusat sehingga daerah-daerah seperti Maluku sangat jauh dari kesejahteraan hal tersebut lah yang ikut mempengaruhi terbentuknya RMS.

Dalam proses mencari makna kebangsaan yang dipandang sebagai identitas sekunder, selalu menghadapi persoalan identitas primer berupa kuatnya solidaritas etnik, agama, adat dan bahasa serta tradisi lokal. Faktor-faktor ini pula yang menyebabkan timbulnya pemberontakan kedaerahan selain faktor ketidakadilan dalam pembagian sumberdaya ekonomi antara Pusat dan Daerah (Maryanov,1958;Harvey, 1983). Ikatan *nation* berada di atas keanekaragaman solidaritas suku-bangsa Disamping itu, tak dapat dipungkiri, bahwa salah satu akar penyebab munculnya gerakan separatis di Indonesia seperti RMS di Maluku, GAM di Aceh dan OPM di Papua lebih disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat di wilayah-wilayah tersebut. Aceh dan Papua dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah tapi penduduk di sana miskin. Adapun Maluku yang mempunyai kekayaan alam dan laut yang melimpah serta pulau-pulau indah dengan parawisata yang menjanjikan. Karena itu, upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat menjadi sangat penting.

Faktor terakhir, adalah sistem pemerintahan yang sentralistik, gaya kepemimpinan di Indonesia cenderung sentralistik, Semua diatur dari pusat dan daerah hanya didikte oleh pusat. Hal ini memang berdampak negatif karena daerah tidak diberi kebebasan untuk mengatur wilayahnya. Pembangunan fisik terpusat hanya di kota-kota besar seperti Jakarta. Hasil kekayaan alam daerah dibawa ke pusat untuk sebagian besar membangun pusat dan sisanya di daerah.

Apabila kita sedikit melakukan perenungan mengenai akar dari munculnya gerakan separatisme biasanya muncul dari ketidakpuasan suatu kelompok etnis terhadap

perlakuan politik, ekonomi, sosial serta pelanggaran HAM. Selain itu, tidak adanya proses demokrasi juga memperparah konflik. serta kurangnya proses komunikasi politik yang saling menguntungkan kedua belah pihak baik pusat maupun daerah adalah juga merupakan hal yang memicu munculnya gerakan-gerakan separatis. Kelahiran gerakan separatis tersebut muncul dari beberapa faktor, yang umumnya disebabkan oleh ketidakadilan pemerintah pusat terhadap daerah dan adanya penerapan hukum yang tidak sesuai dengan keinginan gerakan separatis tersebut. Perjuangan yang dilakukan oleh para aktivis gerakan separatis tersebut pun hampir selalu mengundang konflik terbuka dengan pemerintahan resmi Indonesia.

Sementara itu, hal yang berbeda dilakukan oleh rezim selanjutnya, pada periode ini, konsep pembangunan nasionalisme lebih didefinisikan sebagai kemajuan pembangunan ekonomi dalam sebuah stabilitas politik yang tinggi. Sentralisasi pemerintahan dan pembangunan tampak begitu nyata. ‘Daerah’ kehilangan kesejahteraan ekonomi dan politiknya sebagaimana yang dijanjikan oleh ‘Pusat’. Sementara itu, pengawalan terhadap nasionalisme dilakukan secara represif, yang berdampak pada kebuntuan proses artikulasi ekonomi dan politik dari ‘Daerah’ kepada proses pembuatan kebijakan nasional di ‘Pusat’. Kehidupan bernegara menjadi sangat tiranik. Negara menghegemoni bangsa, dengan mengarahkan konsepsi nasionalisme sesuai dengan kebutuhan rezim penguasa.

Dengan kondisi seperti ini, berbagai etnis masyarkat di ‘Daerah’ tidak lagi merasakan manfaat sebagai bagian dari Indonesia. Perasaan tersisihkan dari kesatuan sebagai bangsa dalam nasionalisme Indonesia muncul. Walhasil, terjadi penguatan

semangat kesukuan dan kedaerahan yang berdampak pada krisis identitas nasional dan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional. Solidaritas nasional pun melemah, tergerus oleh sentimen etnisitas. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, menimbulkan gejolak sosial di berbagai daerah. Konflik sosial hingga upaya disintegrasi nasional merebah di sejumlah daerah. Reformasi pun tidak lagi terelakkan. Keran demokratisasi, bahkan deliberalisasi di buka. Euforia reformasi memicu perubahan sosial yang begitu cepat. Ikatan etnisitas dan kedaerahan kembali menunjukkan identitasnya. Pemerintah pusat seakan kehilangan legitimasi di sejumlah daerah. Puncaknya adalah lepasnya Timor Timur. Belum lagi wacana pemberontakan yang digulirkan oleh Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), hingga Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali bergulir di tingkat daerah.

Ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengelola konflik mengarah pada arogansi intelektual dalam mendefinisikan apa itu nasionalisme. Sejumlah pihak, khususnya yang memiliki kepentingan di Pusat, menafsirkan gejolak sosial yang terjadi di sejumlah daerah sebagai sebuah tindakan institusional yang menentang nasionalisme Indonesia, separatisme. Padahal dalam kenyataan yang terjadi sesungguhnya, kemunculan tindakan yang kita sebut di sini sebagai ‘separatisme’ merupakan buah dari ketidakmampuan pemerintah itu sendiri dalam mengelola konflik, yang pada hakikatnya bersumber pada ketidakadilan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Separatisme tampaknya menjadi isu di mana pelakunya harus dibasmi sedemikian rupa, tanpa memahami alasan apa di balik munculnya gerakan tersebut. Bisa jadi separatisme merupakan bentuk otokritik terhadap hegemoni negara terhadap proses

nation-building yang melahirkan pembangunan yang berketidakadilan. Meski demikian, tidak dapat dinafikan juga bahwa ada beberapa kelompok yang memanfaatkan isu perbedaan etnis dan ketimpangan distribusi kesejahteraan menjadi sebuah sumber daya politik yang memang ditujukan untuk memisahkan dari kebangsaan Indonesia.

Kondisi sosial di sini, dapat diartikan sebagai ketidakadilan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan sosial yang timpang. Salah satu faktor historis terbentuknya nasionalisme Indonesia adalah berdasarkan fungsinya, yaitu bagaimana memberikan manfaat bagi seluruh entitas kultural yang ada dalam kepulauan nusantara. Pada periode awal, integrasi nasional ini memiliki agenda mendasar untuk dapat memberikan kebebasan politik bagi masyarakat yang pada waktu itu berada di bawah kolonialisasi Belanda.

4.2 Upaya anti nasionalisme Gerakan Separatis RMS

Dewasa ini banyak pihak yang mempertanyakan bagaimanakah nasionalisme Indonesia. Ini merupakan sebuah respon atas hegemoni negara, yang selama ini, menunggangi kepentingan nasionalisme menjadi kepentingan negara. Akibatnya muncul berbagai aksi dan gerakan ketidakpuasan dari masyarakat di daerah, seperti halnya gerakan separatis RMS, terutama mereka yang berbeda kultur dengan pihak pemegang otoritas. Respon tersebut menjadi kronik dengan masuknya label separatisme dalam gerakan-gerakan tersebut, dan menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi pemeritan pusat.

Banyak pandangan bahwa separatisme merupakan upaya murni anti nasionalisme, sehingga harus diberantas sedemikian rupa. Namun, dalam menyikapi munculnya gerakan separatis, seharusnya tidak dilihat secara hitam putih seperti itu. Bisa jadi, gerakan separatis tersebut merupakan upaya untuk menuntut kesejahteraan mereka yang terabaikan. Karenanya, dalam menghadapi separatisme, tindakan yang bijak dan arif sangat diperlukan. Langkah yang mungkin bisa ditawarkan adalah dengan distribusi dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan juga melakukan rekonstruksi terhadap pemahaman dan pembangunan nasionalisme Indonesia.

Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, menimbulkan gejolak sosial di berbagai daerah. Konflik sosial hingga upaya disintegrasi nasional merebah di sejumlah daerah. Reformasi pun tidak lagi terelakkan. Keran demokratisasi, bahkan deliberalisasi di buka. Euforia reformasi memicu perubahan sosial yang begitu cepat. Ikatan etnisitas dan kedaerahan kembali menunjukkan identitasnya. Pemerintah pusat seakan kehilangan legitimasi di sejumlah daerah. Puncaknya adalah lepasnya Timor Timur. Belum lagi wacana pemberontakan yang digulirkan oleh Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), hingga Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali bergulir di tingkat daerah. Ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengelola konflik mengarah pada arogansi intelektual dalam mendefinisikan apa itu nasionalisme. Sejumlah pihak, khususnya yang memiliki kepentingan di Pusat, menafsirkan gejolak sosial yang terjadi di sejumlah daerah sebagai sebuah tindakan institusional yang menentang nasionalisme Indonesia, separatisme. Padahal dalam kenyataan yang terjadi sesungguhnya, kemunculan tindakan yang kita sebut di sini sebagai ‘separatisme’

merupakan buah dari ketidakmampuan pemerintah itu sendiri dalam mengelola konflik, yang pada hakikatnya bersumber pada ketidakadilan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Republik Maluku Selatan (RMS) adalah kelompok gerakan separatis yang memerdekakan diri pada tahun 1950 kemudian menjadi pemerintah pengasingan dinegeri Belanda. Keberadaan RMS sangat memberikan ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dibalik kecenderungannya yang tertutup RMS bagaikan bom waktu yang siap meledak. Eksistensinya tidak dapat diperkirakan, walupun begitu RMS adalah kelompok yang patut diwaspadai, mereka bukan kelompok yang dipersenjatai lengkap seperti pasukan yang siap bertempur untuk memperoleh kemerdekaan tetapi mereka mempunyai senjata tanpa peluru yang sewaktu-waktu siap untuk merongrong kesatuan Republik Indonesia (RI).

Kurang lebih dari 50 tahun terus memperjuangkan keinginannya untuk merdeka berbagai ulah dan aksi dimunculkan oleh kelompok ini, eksistensinya tidak dapat dipungkiri mampu membuat pemerintah Indonesia kewalahan. Untuk itu butuh adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap kelompok kecil yang bersuaka di Belanda ini, kebijakan dan ketegasan harus ditunjukan oleh pemerintah Indonesia baik kepada RMS dan Belanda, yang sampai sekarang masih membiarkan RMS berkeliaran bebas dinegaranya.

4.2.1 RMS bukanlah aspirasi seluruh rakyat Maluku

Gerakan separatisme, bukanlah hal yang asing bagi dunia internasional. Separatisme merupakan momok bagi setiap negara, terutama negara yang mengklaim dirinya sebagai negara kesatuan. Menilik struktur sosial di Indonesia yang sangat majemuk, secara horizontal berupa adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama dan adat istiadat serta secara vertikal ditandai dengan perbedaan lapisan kelas atas dan bawah yang disebabkan oleh uang dan kekuasaan. Keragaman yang ada di Indonesia jelas sangat kompleks dan tidak dapat dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu sangat sulit untuk dapat menemukan bentuk integrasi sosial yang dapat menghindarkan Indonesia dari bahaya perpecahan. Hal itu diperparah dengan pembangunan yang tidak merata antara pusat dan daerah.

Berdirinya gerakan separatis yang mengatasnamakan suku, daerah dan agama adalah satu pukulan telak bagi keutuhan bangsa Indonesia, contohnya adalah gerakan separatis RMS, dari awal berdirinya RMS telah menuai banyak kontroversi bagi para pendirinya, salah satunya adalah terungkapnya kejasama antara pemimpin RMS Soumokil dan beberapa pemimpin tentara kolonial Belanda pada waktu itu, yang ternyata pengadaan RMS di rekayasa oleh Mr Christiaan Soumokil yang sering bersikap eksentrik dan bahkan juga tidak senang pada Negara Indonesia Timur, dan lebih berpihak pada kembalinya kolonialisme Belanda.

Untuk meraih ambisinya, Soumokil melakukan kegiatan kampanye, dan pertama-tama berkunjung ke Kupang di Timor dan kemudian ke Manado untuk mempengaruhi masyarakat di sana. Tetapi tujuannya sama sekali tidak berhasil hingga

ia mendarat di Ambon pada 14 Desember. Kesemuanya dengan menggunakan fasilitas Belanda yang diberikan oleh Kolonel Schotborg untuk mempengaruhi agar Indonesia Timur tidak bergabung dengan Republik. Setelah berada di Ambon, Soumokil giat melakukan penyusunan rencana mempertahankan RMS dari penyerbuan pasukan APRIS. Sehari setelah cetusan proklamasi, pihak RMS melakukan perekrutan pada pemuda-pemuda sebagai sukarelawan mempertahankan RMS dari APRIS. Selain Ambon, juga berusaha menarik simpati di berbagai kepulauan. Tetapi kampanye RMS tidak mendapat sambutan dari penduduk di Buru, Aru, Banda, Kei dan Tanimbar. Sementara dukungan terbanyak diperoleh dari penduduk kota Ambon, Seram dan beberapa pulau lainnya sekitar Ambon , dan juga pulau-pulau seputar Maluku Tengah.

Cetusan proklamasi RMS kurang mendapat sambutan, terutama di kalangan pelajar-pelajar dan kalangan ilmuan Ambon di luar Ambon, terutama di Jawa dan Sumatra karena memahami pandangan-pandangan nasionalisme. Pendukung RMS umumnya terdapat dikalangan militer KNIL asal Ambon. Mayoritas penduduk Maluku pada saat RMS didirikan beragama Islam dan Kristen secara berimbang, Namun dengan adanya budaya "Pela Gandong", dapatlah dikatakan bahwa di Kepulauan Maluku, seluruh lapisan dan segenap Masyarakat Maluku bersatu secara kekeluargaan, baik ber-agama Kristen, Islam, maupun agama Hindu dan Budha, semuanya bersatu. Demikian saat itu RMS. berbeda dengan sekarang, sudah banyak pendatang-pendatang baru dari daerah Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara, Jawa Madura maupun daerah lainnya di Indonesia. sehingga hanya sekelompok kecil masyarakat yang mempunyai hubungan keluarga dengan para pengungsi RMS di Belanda yang terus memberikan dukungan,

sedangkan mayoritas masyarakat Maluku kontemporer melihat peristiwa pemberontakan RMS sebagai masa lalu yang suram dan ancaman bagi perkembangan kedamaian dan keharmonisan serta upaya pemulihan setelah perisitiwa kerusuhan Ambon.

Di lain hal pembentukan RMS sama sekali bukan aspirasi dari seluruh masyarakat Maluku Selatan. Hanyalah kepentingan dari beberapa orang yang takut akan status dan kedudukannya terancam apabila bersatu dengan NKRI. Sementara dibawah prakarsa PIM, pada umumnya para pimpinan politik, kepala-kepala desa, pemuka-pemuka agama baik Kristen maupun Islam di Maluku, sepakat untuk menempatkan Maluku Selatan sebagai bagian dari RIS yang di bentuk pada 27 Desember 1949 setelah penyerahan kedaulatan pada hari yang sama.

4.2.2 RMS mengandung unsur provokasi dan dukungan dari luar

Selain upaya anti nasionalisme yang coba dilakukan oleh para aktivis RMS lewat proklamasi kemerdekaan RMS serta aksi penentangan tehadap pemerintah Indonesia, adanya dukungan dan provokasi dari luar juga ikut mempengaruhi eksistensi gerakan separatis RMS tersebut. Luas wilayah Indonesia dapat menjadi potensi yang sangat luas, ditambah lagi dengan tanahnya yang subur dan kekayaan alamnya yanga melimpah. Namun, akhir-akhir ini luas negeri yang dihuni oleh sedikitnya 200 juta jiwa itu justru rawan konflik yang dapat mengilis potensinya. Konflik yang sangat berbahaya dan harus mendapat perhatian serius adalah konflik yang mengarah pada separatisme, seperti yang terjadi di Ambon (Maluku), Aceh, dan Papua. Gerakan separatis yang

mengarah pada pemisahan diri dari Indonesia harus dicermati agar pintu masuk penjajah, baik Amerika Serikat (AS), Inggris, maupun Uni Eropa, dalam rangka mengendalikan Indonesia dapat ditutup rapat-rapat. Kita harus belajar dari kasus Timor Timur di mana upaya internasionalisasi konflik domestik tersebut pada akhirnya mengukuhkan intervensi negara-negara asing untuk memisahkan wilayah konflik tersebut dari wilayah induknya, yaitu Indonesia. Begitu diinternasionalisasi, maka persoalan tersebut sulit untuk ditarik kembali menjadi persoalan domestik. Ini tampak dari begitu sulitnya pemerintah untuk menarik kembali persoalan Aceh dan Papua menjadi sebatas persoalan domestik. Sementara itu, persoalan Maluku pun terus ditarik agar menjadi masalah internasional. Proses internasionalisasi persoalan ini harus kita waspadai karena bisa dijadikan sarana untuk memecah-belah negeri Muslim terbesar Indonesia, seperti yang terjadi terhadap Timor Timur.

Pasca terjadinya kesepakatan politik untuk membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) pada Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda sangat berambisi untuk tetap memiliki pengaruh dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, Dengan adanya negara RIS berarti Belanda masih memiliki kesempatan untuk menanamkan pengaruhnya melalui beberapa negara boneka. Mereka merangsak masuk pada sendi-sendi kekuatan bangsa dan melumerkan baja persatuan bangsa Indonesia. Bagaikan virus yang menggerogoti pemikiran bangsa untuk pada akhirnya memberikan simpati pada usaha mereka. Seperti yang terjadi pada Timor Timur.

Hanya kebulatan tekad bangsa yang dapat meredam usaha-usaha tangan jahil imperialis yang masuk dan memecah belah, seperti cara-cara politik lama Belanda,

devide et empera. Mereka berusaha memecah bangsa Indonesia baik dari usaha di dalam dan diplomasi diluar. Negara adidaya mereka dekati dan negara tetangga yang berbatasi mereka kunjungi. Mereka yang berusaha memecah-mecah dari dalam ini, berusaha secara sistematis untuk memberikan selalu peluang pada separatis RMS dan OPM. Para pemberontak ini jangan dianggap telah mati. Usaha-usaha mereka telah merangsak masuk justru pada sendi-sendi kekuatan bangsa.

Sedangkan di Maluku, upaya separatis oleh gerakan RMS juga menempuh upaya yang sama. RMS mewujud dalam wajah lain bernama Forum Kedaulatan Maluku (FKM). Upaya internasionalisasi persoalan domestik Indonesia juga tampak pada FKM di Maluku. Ketua FKM, Alex Manuputty, mengakui bahwa jaringan FKM yang aktif terdiri dari 50 orang yang tersebar di berbagai negara seperti Australia, Belanda, Jerman, AS, dan Eropa. Bahkan, kini Alex Manuputty dikabarkan kabur ke AS dan bebas berkeliaran di sana sementara pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa.

Sejumlah nara sumber penulis di Ambon dan Maluku Utara menyebutkan, gerakan RMS diduga kuat memperoleh dukungan dari pihak Yahudi Israel. Disebutkannya dalam internet sempat ada situs RMS yang menampilkan artikel terbitan Israel yakni United Israel Bulletin (UIB). Buletin itu mengungkapkan harapan RMS untuk mendapat dukungan dari Israel. Koresponden UIB di PBB, David Horowits dalam terbitan musim panas 1997 menulis: mayoritas pendukung RMS memang dekat dengan Yahudi-Israel. Selama beberapa kali peringatan hari kemerdekaan RMS di Maluku, bendera Israel bersama emblem AS dan Belanda dipadukan dengan emblem RMS. Salah satu berita yang menarik yang dirilis UIB selain tentang persahabatan RMS

dan Israel, juga artikel itu mengungkapkan hubungan antara RMS dan pergerakan di Timtim yang dipimpin Jose Ramos Horta. Menurut David Horowits, ketika Horta menerima Nobel, saat itu salah satu menteri RMS, Edwin Matahelumual mengirim surat kepada Horta. (Sumber : DeVolkskrant.com diakses pada tanggal 29 Juni 2011)

Sedangkan pada harian De Volkskrant (edisi 12 Januari 2000) dilaporkan di halaman depan, RMS mengumpulkan dana dari orang-orang Maluku di Belanda. Dana itu untuk membeli senjata guna membantu "saudara-saudara Kristen" di Maluku. Melalui jaringan internasional, tulis harian De Volkskrant, dana yang terkumpul tersebut akan dibelikan senjata yang selanjutnya dikirim ke Maluku Tengah melalui Filipina Selatan. (Sumber : DeVolkskrant.com diakses pada tanggal 29 Juni 2011)

Internasionalisasi konflik yang terjadi di Maluku dengan turut campur tangan Paus, PBB dan berbagai pernyataan AS yang disampaikan berkali-kali, tidak lain adalah dalam rangka memisahkan wilayah Maluku dari Indonesia, dengan alasan bahwa mayoritas penduduknya adalah Kristen seperti yang banyak disinyalir oleh media massa yang tendensius. Semua itu menjadi catatan tersendiri bahwa memang ada dukungan terhadap kelompok separatis di Indonesia. Semua fakta tadi menggambarkan dengan jelas bahwa upaya internasionalisasi persoalan domestik Indonesia, khususnya persoalan disintegrasi, tampaknya memang merupakan agenda negara-negara imperialis Barat. Tujuannya jelas agar dunia internasional mendukung disintegrasi tersebut seperti yang terjadi di Timor Timur. Sayangnya, pemerintah tidak bersikap tegas dan tidak melakukan manuver yang tepat mengantisipasi persoalan tersebut.

Separatis yang terjadi di indonesia merupakan faktor mendasar, yang melatarbelakangi adalah faktor pendidikan. pertama, rakyat yang ingin memisahkan diri tidak terlepas dari minimnya pendidikan mereka untuk melihat suatu hal dengan bijaksana, sehingga masyarakat mudah ditunggangi oleh pihak yang berkepentingan untuk melepaskan diri dari indonesia. kedua, pendidikan masyarakat masih minim, sehingga mereka tidak memiliki keahlian untuk mengekplorasi sumber daya mereka, dan kemudian mereka cemburu dengan pendatang yang mampu memberdayakan kekayaan alam di daerah tersebut.

4.2.3 Aktivis Gerakan Separatis RMS

Eksistensi para aktivis serta gerakan separatis RMS tidak dapat dipungkiri ada unsur provokasi serta pengaruh dari luar untuk itu pemerintah Indonesia tidak boleh menutup mata tehadap gerakan separatis tersebut. Adalah aktivis gerakan separatis RMS yang selalu berupaya untuk merongrong kesatuan Republik Indonesia (RI) dengan rencana dan aksi-aksi yang dijalankan, dan tidak dapat dipungkiri bahwa aksi-aksi yang mereka lancarkan selalu berhasil membuat pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda kewalahan. Adapun aksi-aksi aktivis RMS yang berhasil membuat pemerintah Belanda marah dan kewalahan.

Pemerintah Belanda mendukung kemerdekaan RMS, Namun di tahun 1978 terjadi peristiwa Wassenaar, dimana beberapa elemen pemerintahan RMS melakukan serangan kepada Pemerintah Belanda sebagai protes terhadap kebijakan Pemerintah Belanda. Oleh Press di Belanda dikatakanlah peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan

para aktifis RMS di Belanda. Ada yang mengatakan serangan ini disebabkan karena pemerintah Belanda menarik dukungan mereka terhadap RMS. Ada lagi yang menyatakan serangan teror ini dilakukan karena pendukung RMS frustasi, karena Belanda tidak dengan sepenuh hati memberikan dukungan sejak mula. Di antara kegiatan yang di lansir Press Belanda sabagai teror, adalah ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar.

Selama tahun 70an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain (atau setidaknya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api.

Pada tahun 2007 dengan adanya pemimpin baru RMS Jhon Wattilete, para aktivis RMS di Belanda seakan mendapat angin segar berapa aksi dan rencana disusun guna membuktikan keeksistensian RMS baik di Belanda, di Indonesia maupun pada dunia internasional. Menurut radio nasional Belanda Aktivis RMS yang masih aktif sampai sekarang pun diperkirakan mencapai lebih dari 1500 orang yang sewaktu-waktu siap menyusun rencana dan melakukan aksi-aksi untuk mencapai cita-cita masa lalu mereka yaitu “merdeka”.

4.2.3.1 Eksistensi RMS di Belanda

Keberadaan RMS di negeri kincir angin tersebut menuai banyak opini publik dan pertanyaan yang timbul dibalik eksistensi serta pengaruhnya dalam hubungan luar negeri Indonesia-Belanda. Tidak dapat dipungkiri bahwa angin segar yang diberikan para aktivis RMS di Belanda berpengaruh bagi eksistensi gerakan separatis ini baik di Indonesia maupun di Belanda sendiri. Melalui aksi penentangan terhadap pemerintah Indonesia, RMS tidak hanya bergerak aktif dalam negeri Indonesia namum upaya serta aksi juga selalu dilakukan oleh para aktivis gerakan separatis ini di negeri kincir angin Belanda.

Sebagai salah seorang dari 230 jutaan warga negara Indonesia, sangat kecewa ketika salah seorang politisi sayap kanan Belanda mengatakan bahwa: Maluku sudah saatnya merdeka dari Indonesia yang sangat Islamisme tersebut. Kata-kata yang dikemukakan politisi anti Islam Belanda, Heiss Wildesh yang dimuat berbagai media negeri kincir angit tersebut, serta di siarkan juga oleh Radio Belanda tanggal 28 April tersebut kurang mendapat tanggapan serius dari pemerintah Indonesia.

Adalah apa yang di kemukakan Heiss Wildesh tersebut sesungguhnya merupakan penghinaan serius terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, yang Maluku sudah harga mati sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah teritorial kedaulatan Indonesia. Namun anehnya dalam hal ini tidak ada reaksi sedikit pun dari Presiden SBY dan juga dari Menlunya untuk menanggapinya, apalagi mengirimkan nota protes kepada Duta Besar Belanda di Jakarta. Kecuali kecaman yang datang dari para anggota partai yang katanya bahwa Pemerintah SBY selalu terlambat dalam

menanggapi berbagai masalah, meskipun masalah tersebut sangat serius karena pihak asing ikut mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Selain itu tanggapan salah seorang anggota dewan yang juga sejalan dengan Pemerintah, meskipun kecamannya lebih lunak. Ia mengatakan, bahwa masalah tersebut tidak usah ditanggapi serius, biarkan saja berita-berita seperti itu berlalu dengan sendirinya. Nada seperti itu sangat sesuai dengan SBY, bahkan ketika orang nomor satu di negara Indonesia yang juga ketua pembina partai Demokrat itu hendak melakukan kunjungan kenegaraan ke Belanda, tiba -tiba saja di saat -saat akhir ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Pengadilan di Den Haag, Selasa 5 Oktober 2010, mengadakan sidang kilat atas gugatan dari pimpinan kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) yang berada di pengasingan di Belanda. Menurut media massa Belanda, tuntutannya sangat menggusarkan: meminta pihak berwenang agar menangkap Presiden Yudhoyono atas pelanggaran HAM di Maluku. (www.jakartapress.com diakses pada tanggal 8 Juli 2011)

Menurut Wattilete, Yudhoyono harus ditahan karena melanggar hak-hak asasi manusia di Maluku. "Saat ini ada 93 orang dipenjara karena mereka berdemonstrasi secara damai bagi Republik Maluku Selatan. Data ini berdasarkan laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch." Selain menggugat Yudhoyono melalui pengadilan, Wattilete mengungkapkan bahwa RMS juga akan menggelar demonstrasi di Den Haag pada Kamis, 7 Oktober 2010, atau pada hari kedua lawatan Yudhoyono yang dijadwalkan sebelumnya. "Kami ingin agar ada perhatian atas pelanggaran HAM di Indonesia," kata Wattilete yang dikutip harian De Telegraaf. Wattilete bahkan mengajak simpatisan RMS di Belanda mengambil libur kerja supaya

bisa turut datang berdemonstrasi. (Sumber : Vivanews.com diakses pada tanggal 29 Juni 2011)

Hal tesebut lah yang membuat Presiden SBY menunda keberangkatan sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. Strategi politik seperti yang dijalankan SBY selama ini, yang menganggap tidak penting dan tidak serius terhadap masalah RMS di Belanda titu, perlu direvisi dan dirubah supaya harga diri bangsa Indonesia tidak di injak-injak oleh mereka. Bangsa Indonesia sebagaimana halnya juga bangsa lain di dunia memiliki harga diri yang perlu dihormati, seperti halnya Indonesia menghormati negara lain termasuk Belanda. Karenanya hendaknya pemerintah segera mengirimkan nota protes kepada Kedutaan Besar Belanda di Jakarta tentang masalah RMS tersebut, sehingga negeri Belanda mengambilkan tindakan seperlunya terhadap RMS. Presiden H.Muhammad Suharto sebelumnya pernah memutuskan kerjasamanya dengan Belanda, dimana Indonesia tidak menghendaki Belanda tetap menjadi anggota IGGI karena seringkali mencampuri urusan domestik Indonesia. Tindakan keras seperti itu seharusnya bisa ditiru oleh SBY, supaya bangsa lain menghormati Indonesia .

Selanjutnya ketika Yusril Ihza Mahendra mengunjungi Belanda, para anggota RMS dan para politisi Belanda juga melakukan unjuk rasa mengecam keras pelanggaran hak -hak asasi manusia (HAM) di Maluku, namun Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Hukum dan HAM waktu itu segera balik mengecam Belanda dengan membeberkan kekejaman pasukan Belanda di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya ia sebutkan kekejaman Westerling di Makassar. Kecaman keras Yusril Ihza Mahendra terhadap kekejaman masa lalu Belanda di Indonesia sempat menimbulkan

ketegangan hubungan diplomatik Belanda-Indonesia, sehingga bekas Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) mempersingkat kunjungannya ke negeri kincir angin tersebut. Sehingga jika dulu bisa mengapa sekarang tidak, kita juga bangsa yang berperadaban, serta memiliki harga diri. Kita jangan dianggap sebagai inlander oleh bangsa lain (Sumber : Vivanews.com diakses pada tanggal 30 Juni 2011).

4.2.3.2 Eksistensi RMS di Indonesia (Maluku)

Tidak hanya membuktikan keaktifan dan eksistensinya di Belanda, aktivis RMS juga membuktikan eksistensinya di Indonesia, Ini terbukti dengan adanya Aksi Gerakan Separatis RMS yang ingin menunjukan eksistensinya di bumi Maluku pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Sejak berdiri pada tanggal 25 April 1950, Republik Maluku Selatan (RMS) yang di Proklamasikan orang-orang bekas prajurit KNIL dan Pro Belanda (diantaranya Chr.Soumokil, Ir.J.A.Manusama dan J.H.Manuhutu), dengan Presiden Dr.Chr.R.S. Soumokil bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, RMS bertujuan menjadi negara sendiri lepas dari NKRI. Hingga sekarang masih tetap eksis dengan perjuangan dan tujuannya untuk memisahkan diri dari NKRI, ini di buktikan dengan berbagai macam aksi yang dilakukan oleh aktivis RMS seperti pengibaran bendera, propaganda terhadap masyarakat Maluku dan aksi lainnya yang dapat menodai kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia. (Sumber : jakartapress.com diakses pada tanggal 3 Juli 2011)

Beberapa tahun terakhir ini secara berkesinambungan RMS melakukan propaganda di Maluku yang menjadi basis gerakannya, diantarannya pada tahun 2001

dideklarasikan sikap RMS yang diorganisir oleh FKM (Front Kedaulatan Maluku) bertempat di Hotel Amboina yang diketuai oleh Dr. Alex Manuputty. Deklarasi itu berisi tuntutan kepada pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan RMS di Maluku yang katanya telah direbut dengan paksa melalui angkatan perang Indonesia pada tahun 1950.

Masih teringat jelas dibenak kita, peristiwa yang terjadi pada tahun 2004, dimana pada saat itu para aktivis RMS dengan kreatifitasnya mengibarkan bendera RMS (benang raja) dan melakukan konvoi sepanjang kota Ambon dengan begitu bebas tanpa ada rasa takut. Pada saat itu pula masyarakat maluku dengan perasaan khawatir, cemas hanya bisa melihat dan menyaksikan aksi brutal tersebut. Aparat keamanan yang diharapkan sebagai abdi Negara yang berfungsi untuk menjaga stabilitas keutuhan NKRI, hanya bisa melihat tanpa melakukan tindakan preventif dan membubarkan aksi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa aparat keamanan Bangsa ini tidak becus dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keutuhan NKRI.

Gerakan separatis itu dihidupkan kembali setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, terutama oleh tokoh-tokoh warga keturunan Maluku di Belanda. Eksisnya RMS di Belanda memberi angin segar bagi bangkitnya lagi harapan pada sebagian kecil rakyat Maluku. Maka, terjadilah peristiwa 29 Juni 2007 ketika beberapa elemen aktivis RMS menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pejabat, Duta Besar Negara Sahabat dan tamu asing. Republik Maluku selatan (RMS) kembali menunjukan eksistensinya sebagai gerakan separatis yang bertujuan untuk memisahkan

diri dari NKRI, dengan mengibarkn bendera RMS (Benang Raja) disaat acara pembukaan HARGANAS berlangsung. Peristiwa ini sangat memalukan kredibilitas Bangsa Indonesia dimata dunia Internasional. Peristiwa tersebut menunjukan betapa lemahnya Badan Intelejen Nasional (BIN), aparat TNI dan POLRI dalam mendeteksi dan melakukan pengamanan sebagai upaya tindakan preventif mencegah terjadinya gerakan Separatis Makar yang memang sudah mengkar di daerah penghasil rempah-rempah tersebut.

Kelompok tersebut menari tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan sambutan. Para hadirin mengira tarian itu bagian dari upacara meskipun sebenarnya tidak ada dalam jadwal. Mulanya aparat membiarkan saja aksi ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para penari itu ditangkapi. Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada saat ini insiden tersebut sedang diselidiki. Beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa RMS masih eksis dan mempunyai Presiden Transisi bernama Simon Saiya. Beberapa elemen RMS yang dianggap penting ditahan di kantor Densus 88 Anti Teror. Sebagian besar dari para penari liar ini adalah bekas tahanan kasus makar yang terlibat pengibaran bendera RMS pada sejumlah tempat di Pulau Ambon dan Pulau Haruku pada tahun 2004 dan 2005. Mereka sebagian berasal dari Desa Aboru, Kariuw, Haruku, dan Sameth, Kabupaten Maluku Tengah. (Sumber : jakartapress.com diakses pada tanggal 3 Juli 2011).

Dengan adanaya fakta riil yang selama ini kita saksikan bersama, ternyata eksistensi gerakan separatis RMS di Maluku tetap konsisten dengan perjuangan mereka yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Entah apakah sistim hukum yang lemah atau memang Negara ini tidak mempunyai kredibilitas lagi dalam menjaga keutuhannya.

Sungguh ironis sekali, RMS yang katanya telah lama dibumihanguskan di Republik ini, ternyata masih terus melakukan aktifitasnya. Apakah negara yang besar ini, tidak bisa menyelesaikan masalah separatis yang merongrong kesatuan Bangsa ini. Alex Manuputty sebagai tokoh sentral RMS pernah ditangkap pada tahun 2003 oleh pemerintah, tetapi mengapa Dengan pengamanan ekstra ketat, seorang yang nyata-nyata tersangka gerakan separatis, bisa meloloskan diri dari pantauan MABES POLRI. Sungguh diluar dugaan kita, hingga kini Alex Manuputty sedang melakukan lobi poitik di PBB, apakah Bangsa yang besar ini, ingin kehilangan Maluku sebagai Propinsi yang pernah menjadi delapan Propinsi diawal terbentuknya Negara ini, lepas begitu saja dari bumi pangkuan Ibu Pertiwi yang direbut dengan ceceran darah dan air mata para pejuang kita, sungguh naif, jika pemerintah hanya melihat sebelah mata saja masalah sebesar ini.

Dengan adanya peristiwa pengibaran bendera RMS pada peringatan HARGANAS, membuka mata kita bersama, bahwa gerakan separatis RMS sudah saatnya dimusnahkan dibumi pertiwi ini. Yang diharapkan oleh masyarakat Maluku pada khususnya dan Indonesia pada umumnya adalah sikap tegas pemerintah dalam memberantas gerakan separatis RMS hingga tuntas. Jika pemerintah cuek dan tidak

bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah RMS ini. Maka jangan salahkan masyarakat jika Maluku keluar dari NKRI dan menjadi seperti Timor Leste.

Gerakan separatis di Indonesia bukanlah hal yang "asing" bagi pemerintah Indonesia, setidaknya selama perjalanan kemerdekaan Indonesia beberapa gerakan separatis terus bermunculan, baik gerakan separatis yang berbasis wilayah, seperti : Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Fretilin di Timor-Timor (sekarang Timor Leste); maupun gerakan separatis yang berbasis kepada agama, seperti DI/TII.

Tarian Cakalele itu membuat gempar bangsa ini. Rakyat marah. Demonstrasi terjadi, menghujat bahkan tak segan melukai siapa-siapa yang terlibat. Maluku resah. Sementara seorang mantan intelejen memaparkan kekhawatiran akan meluasnya separatisme. Lalu kemana nasionalisme, Apa membakar bendera RMS adalah kobaran dari semangat nasionalisme. Setelah tarian berdurasi lima menit itu, bergulirlah berbagai wacana yang hebat. Lagi-lagi Indonesia menjadi sorotan mancanegara. Isu separatisme mencuat ke permukaan. Aksi-aksi RMS setiap tahunnya selalu diwaspadai petugas keamanan. Terutama saat memasuki perayaan ulang tahun kelahiran setiap 25 April. Petugas selalu mewaspadai kantung-kantung pengibaran bendera RMS di setiap daerah. Terutama di Desa Aboru, Pulau Haruku. Hari kelahiran diambil dari diproklamasikannya RMS pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur yang saat itu masih Republik Indonesia Serikat.

Aksi RMS juga dituding berada di balik kerusuhan Ambon antara 1999-2004. RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan

mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS ditangkap dan diadili. Pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan Ambon.

Adapun eksistensi lain yang ditunjukan aktivis RMS lewat perencanaan aksi pengibaran bendera RMS pada acara puncak Sail Banda 2010 di Ambon, namun kemudian berhasil diketahui oleh aparat keamanan dan para aktivis tersebut kemudian diringkus. Menurut bekas Kepala Bidang Humas Polda Maluku itu para tersangka selain merencanakan mengibarkan bendera RMS saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara puncak Sail Banda 2010 di Ambon, 3 Agustus lalu, mereka juga merencanakan memasang spanduk dan melepas balon gas dengan ucapan selamat datang RMS. “Motifnya untuk tunjukkan eksistensi RMS masih ada di Maluku,” ujar Didik Kelima tersangka tersebut masing-masing Samuel Pattipeiluhu, Josef Louhenapessy, Demianus Lessy, Yunus Markus dan Fredi Tutusariana. Mereka dibekuk oleh petugas Polsek Saparua dibantu Koramil Saparua. “Ditambah dengan Saparua, sudah 20 orang yang ditangkap sejak 28 Juli sampai hari ini,” kata Kepala Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Ajun Komisaris Besar Didik Agung Widjanarko, dalam acara jumpa pers di Markas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease di kawasan Parigilima Ambon, Rabu, 11 Agustus 2010. Beliau mengatakan,

polisi menyita barang bukti berupa bendera RMS 19 lembar, satu unit mesin jahit, satu tabung gas yang sudah dimodifikasi, beberapa dokumen dan 134 poster. Dalam dokumen yang disita, terdapat struktur baru pemerintahan transisi RMS di Maluku. (Sumber : jakartapress.com diakses pada tanggal 3 Juli 2011).

4.3 Kebebasan yang diberikan Belanda untuk RMS di Negaranya, dibalik pengakuan *de facto* dan *de jure* terhadap Indonesia

Sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, hubungan dengan pemerintah Kerajaan Belanda selalu mengalami pasang surut. Hubungan Indonesia dan Belanda terjalin sangat baik justru terjadi pada era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Namun, bukan berarti itu tidak bermasalah. Ketegangan sempat terjadi ketika kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) akan mendemo kedatangan Presiden Soeharto pada 1978. Begitu juga pembubaran Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) oleh Soeharto yang membuat berang pemerintah Belanda di awal 1990-an.

Salah satu penyebabnya juga adalah belum adanya penyelesaian mengenai gerakan separatis RMS di negara kincir angin tersebut, dinamika di dalam negeri Belanda sendiri untuk menyelesaikan persoalan RMS ini dengan baik belum dapat tercapai. Untuk itu diharapkan dapat menghasilkan suatu konklusi yang baik Terkait sering kalinya gerakan RMS ini mengganggu hubungan bilateral kedua negara, Indonesia sebenarnya sangat mengharapkan adanya suatu sikap yang lebih dari pemerintah Belanda, agar tidak ada lagi upaya-upaya untuk merongrong hubungan

bilateral kedua negara ini. Selama ini gerakan kelompok seperti RMS di luar negeri terus memanfaatkan situasi politik di negara bersangkutan, khususnya Belanda.

Di tahun 50-an RMS merupakan bagian dari politik pecah belah penjajah. Belanda sengaja menciptakan beberapa negara bagian untuk mendukung eksistensinya di Republik Indonesia Serikat (RIS). Saat pemerintahan RIS dinyatakan bubar dan menjadi Republik Indonesia, negara-negara bagian ini sebagian bermetamorfosa menjadi gerakan pemberontakan sama halnya dengan RMS yang kemudian menjadi gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Keberadaan ratusan atau bahkan ribuan anggota Republik Maluku Selatan (RMS) di negeri kincir angin ibarat kerikil dalam sepatu bagi hubungan Indonesia-Belanda. Kelompok RMS di negeri Kincir Angin ini memang mengklaim memiliki kekuatan yang banyak. Belanda terus memberikan ruang gerak yang leluasa kepada aktivis pro-RMS di negaranya. Belanda memberikan kebebasan kepada pemerintah RMS untuk tetap menjalankan semua kebijakan layaknya sebuah pemerintahan yang memiliki lembaga sosial, politik, keamanan, dan luar negeri. Komunikasi antara pemerintahan RMS di Belanda dengan para menteri dan para birokrat mereka di Ambon berjalan lancar dan terkendali. Walau bukan kelompok separatis bersenjata, namun kelompok yang melakukan perlawanan politis dan diplomasi ini, dinilai membahayakan. Apalagi mereka sekarang merupakan generasi ketiga yang tinggal di Belanda. Sebagai warga Belanda mereka memiliki ragam profesi sebagai pekerjaannya, mulai tentara, polisi hingga pengacara.

Hubungan bilateral Indonesia-Belanda memang sering diganggu oleh aksi-aksi RMS. Juga oleh problem psikologis masa lalu, di mana Belanda pernah menjajah

Indonesia. Namun, Indonesia-Belanda telah lama berupaya mempererat hubungan dengan menyamakan cara pandang. Hal ini antara lain ditandai dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2005 silam.

Bernard Bot juga telah menyampaikan pengakuan secara de facto atas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pengakuan tersebut akan diperkuat oleh dokumen tertulis yang bakal ditandatangi Indonesia dan Belanda tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ini akan menyudahi berpuluh tahun pengingkaran Belanda yang hanya mengakui penyerahan kedaulatan kepada Indonesia di Istana Dam, Amsterdam, pada 27 Desember 1949 setelah pelaksanaan Konferensi Meja Bundar. Pengakuan tertulis yang akan ditandangani Presiden SBY dan Pemerintah Belanda awal Oktober 2010 itu, telah lama dirundingkan kedua negara sejak 2009. Pengakuan yang diharapkan menghilangkan beban sejarah itu pun akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjiaan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Belanda agar kedua negara semakin mempererat dan memperluas kerjasama di masa depan. "Yang signifikan adalah penandatanganan perjanjian komprehensif. Karena kedua negara ini bisa melihat ke depan, tidak lagi terseret-seret oleh beban sejarah dan menunjukkan kedewasaan hubungan kedua negara".

Selain itu butuh ketegasan dari pemerintah Indonesia baik itu kepada RMS sendiri dan kepada pemerintah Belanda yang selalu memberikan kelonggaran terhadap eksistensi RMS, Pemerintah Indonesia perlu tegas terhadap semua tindakan makar dan gerakan separatisme. Meskipun saat ini aksi-aksi gerakan separatis bersenjata tidak

nampak, namun aksi-aksi melalui jalur politik dan diplomatik layak diwaspadai. Seperti ancaman dari gerakan separatisme Republik Maluku Sealatan (RMS) dengan memanfaatkan momen kunjungan Presiden SBY ke Belanda.

Adapun pemberitaan di situs Radio Nederland Wereldomroep, Sabtu (2/10), merupakan propaganda internasional untuk menunjukan keberadaan RMS. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa pemerintah RMS di pengasingan akan menuntut penahanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui proses di pengadilan Belanda. Presiden RMS John Wattilete juga meminta Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkende untuk mengimbau Yudhoyono agar Indonesia menghentikan penganiayaan dan penahanan para pendukung RMS.

Hal tersebut menandakan kelemahan bangsa Indonesia yang terkesan membiarkan gerakan separatis RMS tersebut hidup dan eksis serta mengancam keutuhan NKRI dengan menjelek-jelekan nama Indonesia dengan isu pelanggaran HAMnya. Kejadian tersebut membuat sebagian masyarakat Indonesia geram dan berpendapat bahwa apabila negara kincir angin tersebut tidak memberikan kebebasan bagi para aktivis RMS dinegaranya tentunya mereka tidak akan mampu melakukan aksi penentangan terhadap pemerintah Indonesia. Presiden SBY tetap mengatakan hubungan bilateral terus berjalan. Namun yang penting, hubungan bilateral ini diharapkan tidak dilakukan secara terbatas pada hubungan formal, tapi juga saling menghormati satu sama lainnya. Untuk itu perlu adanya ketegasan dari pemerintah Belanda terhadap gerakan RMS ini, selain karena menghargai Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dalam hubungan bilateral pun kedua negara ini sama–sama saling

membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu RMS tidak boleh terus dibiarkan eksis dan berkeliaran karena akan berdampak bagi hubungan bilateral Indonesia-Belanda kedepannya.

4.3.1 Aktivis RMS di Belanda

Dengan Kapal Kota Inten, tentara KNIL keturunan Maluku (aktivis RMS) bersama keluarga mereka tiba di pelabuhan Rotterdam, 21 Maret 1951. Itu adalah awal kedatangan sekitar 4000 orang Maluku ke Belanda. tepat 60 tahun lalu, orang-orang Maluku pertama datang ke Belanda. Sejarah orang Maluku di Belanda tak hanya dihiasi tragedi, namun juga kegembiraan. Lama sekali mereka berpikir bahwa mereka akan kembali pulang ke kampung halaman di Maluku. "Hingga akhir tahun 70-an mereka adalah pengungsi, orang yang merantau. Sejak awal 80-an mereka berubah menjadi penduduk migran Belanda.(Sumber : http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/orang-maluku-sudah-60-tahun-di-belanda/ diakses pada tanggal 5 Juli 2011)

Saat ini Aktivis RMS kebanyakan adalah generasi ke-3 di Belanda mencakup semua anggota kelompok etnik asal Kepulauan Maluku beserta keturunannya yang bermukim dan menjadi warganegara Belanda. Mereka sesungguhnya tidaklah homogen berasal dari satu suku bangsa yang sama, tetapi semuanya memiliki akar keluarga yang bermukim di Kep. Maluku dan berpihak pada Belanda pada waktu terjadi perang di masa awal Kemerdekaan Indonesia (1945-1949).

Rupanya Belanda hanya memberikan janji kosong. Sampai di Belanda orang-orang Maluku ini ditempatkan di barak-barak atau kamp-kamp yang jauh dari kota atau

di desa terpencil. Mereka juga dikeluarkan dari keanggotaan KNIL dan tidak mendapat gaji. Sampai tahun 1956 mereka mendapat makanan, minuman, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya dari pemerintah Belanda secara cuma-cuma. Setelah itu, mereka harus mencari pekerjaan. Padahal selama ini mereka tidak pernah berintegrasi dengan masyarakat Belanda. Kebanyakan juga tidak bisa bahasa Belanda. Mereka sulit mendapat pekerjaan. Dari sini timbul banyak masalah sosial dan ekonomi, dan puncaknya adalah penyanderaan kereta api tahun 1975 dan penyanderaan sebuah sekolah dasar di Bovensmilde tahun 1977 oleh para pendukung RMS. (Sumber : http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/orang-maluku-sudah-60-tahun-di-belanda/ diakses pada tanggal 5 Juli 2011)

Seiring dengan berlalunya waktu kehidupan para aktivis RMS di belanda yang sebagian besarnya telah berkebangsaan Belanda berangsur-angsur baik. Kebanyakan dari mereka yang sekarang adalah generasi ke-Tiga telah mendapatkan kehidupan yang layak, banyak profesi yang mereka geluti diantaranya Pengacara, Pemain Sepak Bola serta Musisi adapun yang bergabung dalam kantor pemerintahan Belanda. Perlahan cita-cita nenek moyang mereka tentang kemerdekaan Maluku semakin tipis harapannya dalam benak mereka. Mereka lebih peduli tentang kehidupan mereka kedepannya, tentang kebutuhan hidup dan bagaimana cara mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Angin segar bagi kelanjutan eksistensi RMS pun berhembus, melalui Presiden RMS John Wattilete gerakan separatis ini pun dihidupkan kembali. Eksistensi mereka ditandai dengan adanya pengibaran bendera RMS pada peringatan HARGANAS di

maluku tahun 2007 silam, kemudian disusul dengan tuntutan mereka di pengadilan Den Haag atas pelanggaran HAM yang dilakukan Presiden SBY tahun 2010.

4.3.2 Pemerintahan dan Wilayah RMS di Belanda

Eksistensi gerakan separatis RMS di Belanda dan Indonesia khususnya Ambon (Maluku) tentunya tidak terlepas dari keberadaan pemerintah dan aktivis RMS di Belanda. Pada saat Dr. Soumokil mengasingkan diri ke Pulau Seram. Ia ditangkap di Seram pada 2 Desember 1962, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer, dan eksekusinya dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 12 April 1966. Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Prof. Johan Manusama, pemimpin kedua Frans Tutuhatunewa turun pada tanggal 25 april 2009. Kini John Wattilete adalah pemimpin RMS pengasingan di Belanda. Kemudian disusul dengan para aktivis RMS lainnya bersama suami, istri dan anak-anak mereka. Di Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalankan semua kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik, Keamanan dan Luar Negeri. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan para Birokrat di Ambon tetap berjalan lancar.

Pemerintah RMS yang berada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan bekal dokumentasi dan bukti perjuangan RMS, para pendukung RMS membentuk apa yang disebut Pemerintahan RMS di pengasingan. Di Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalankan semua kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik, Keamanan dan Luar Negeri. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan para Birokrat di Ambon berjalan lancar terkendali. Keadaan

ini membuat pemerintah indonesia pada akhirnya menyatakan bahwa Pemerintah RMS yang berada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan bekal dokumentasi dan bukti perjuangan RMS, para pendukung RMS membentuk apa yang disebut Pemerintahan RMS di pengasingan.

Pemerintahan pengasingan RMS di Belanda bertempat di De Klenckestraat 42, 9404 KW Assen-The Netherlands, Selain itu RMS juga mempunyai satu wilayah di negara kincir angin tersebut yang menjadi tempat tinggal dari sebagian aktivis RMS, wilayah tersebut dijuluki sebagai "Kampoeng Ambon". Yang juga bertempat di De Klenckestraat.

4.3.3 Perlakuan Belanda terhadap aktivis RMS dan WNI khususnya Maluku

Belanda walaupun telah lama meninggalkan daerah jajahannya yaitu Indonesia, Belanda dan Indonesia tidak bisa lepas begitu saja dari pengaruh satu sama lain. Pada saat hengkang dari Indonesia, bukan hanya warga Belanda, tetapi juga ratusan ribu warga pribumi (antara lain asal Maluku), ikut serta menuju tanah Belanda dan menetap di sana. Padahal tujuan awalnya adalah tinggal sementara. Berawal dari cita-cita nenek moyagnya yang suatu saat ingin kembali ke Maluku yang merdeka dan berdaulat, berkat bantuan dan dukungan Belanda warga asal Maluku yang juga pendukung keras Republik Maluku Selatan (RMS) berbondong-bondong mnegungsi ke Belanda, dengan harap dapat di bantu oleh Belanda untuk mewujudkan cita-cita mereka yaitu "Merdeka".

WNI asal Maluku juga banyak melakukan perkawinan campuran selama ratusan tahun, kini di Belanda terdapat jutaan "orang Indo", baik yang WNI maupun yang telah

berkewarganegaraan Belanda. Perlakuan Belanda terhadap para aktivis RMS dan WNI yang berada di negeri kincir angin tersebut pun agak sedikit berbeda, mereka lebih diberikan kebebasan dari pihak pemerintah Belanda. Hal-hal seperti Kewarganegaraan, Pendidikan serta lapangan pekerjaan lebih dipermudah untuk para aktivis RMS serta WNI asal Maluku.

Warga Maluku walaupun akhirnya memperoleh tempat tersendiri di Belanda dan mendapat kewarganegaraan Belanda, banyak di antara mereka tetap merasa sebagai "bukan Belanda", dan Tanah Air mereka masih tetap tanah Maluku. Kisah diaspora warga Maluku bisa dicermati di Museum Maluku di Utrecht. Masalah sensitif bagaikan duri dalam daging yang seharusnya dibicarakan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Belanda. Tetapi, ini belum terlaksana, terutama yang menyangkut status Republik Maluku Selatan (RMS).

4.4 Upaya RMS untuk lakukan internasionalisasi gerakan

Seperti sadar akan zaman, gerakan-gerakan separatis tersebut selain menggunakan instrument kekerasan dalam perjuangannya ternyata juga memanfaatkan kemampuan berdiplomasi yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemampuan berdiplomasi gerakan separatis tersebut digunakan untuk mendapat simpati masyarakat dalam negeri maupun luar negeri terhadap perjuangan mereka. Tak jarang kemampuan berdiplomasi tersebut juga dilakukan dalam rangka meraih dukungan pemerintahan Negara lain untuk mendukung gerakan mereka dan dapat

memberikan perlindungan bagi para aktivis yang berhasil keluar dari Indonesia untuk menghindari penangkapan oleh pemerintah Indonesia.

Yang akan menjadi masalah bagi Indonesia adalah apabila isu gerakan separatis telah menjadi isu internasional, bukan lagi isu nasional. Sekali saja isu separatis menjadi isu internasional, dalam artian menjadi salah satu bahan pembahasan media maupun organisasi internasional, maka gerak-gerik pemerintah Indonesia dalam menyikapi isu separatis tersebut juga akan menjadi sorotan public internasional, ditambah manuver aktif para aktivis dalam membentuk opini public akan menjadi suatu hal yang dapat memojokkan pemerintah Indonesia, contoh terbaru gugatan aktivis RMS terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Indonesia di pengadilan HAM telah menunjukkan efektifitas internasionalisasi isu dan diplomasi public gerakan separatis.

Hal kedua yang menyebabkan Indonesia rentan terhadap gerakan separatis adalah internasionalisasi masalah. Indonesia sangat lemah ketika permasalahan didalam negerinya dibawa ketingkat internasional. Ini telah dibuktikan oleh bangsa Timor Timur. Adalah Ramos Horta yang menggunakan strategi internasionalisasi isu Timor Timur. Banyak cara digunakan termasuk menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat. Ramos Horta tahu bahwa pelanggaran HAM merupakan isu yang disukai oleh bangsa-bangsa Eropah, Australia dan Amerika. Para aktivis pro-kemerdekaan Timor Timur juga faham bahwa Indonesia berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan negara-negara lain. Bukankah Indonesia serba ketergantungan dengan begitu banyak negara, Apakah Indonesia punya *tidak sungkan* berkonfrontasi dengan negara-negara serupa Amerika, Inggris, Australia, Perancis, Portugal? Ramos Horta bahkan

faham Indonesia tidak memiliki cukup nyali ketika berhadapan dengan Malaysia atau Singapura sekalipun.

Memahami lemahnya Indonesia berhadapan dengan komunitas internasional kemudian dijadikan strategi untuk menginternasionalisasi isu-isu separatisme. Strategi yang sama dengan Timor Timur kemudian juga digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Indonesia kemudian "diseret" GAM untuk berunding di Helsinski. Bayangkan suatu gerakan sekaliber GAM mampu duduk sejajar dengan Indonesia sebagai negara. Walhasil Indonesia berada pada posisi sulit ketika proses itu kemudian mengikutsertakan negara-negara besar sekaligus menjadi tontonan dunia internasional. Sulit untuk tidak terus berunding. Sulit untuk berkeras terhadap GAM. Walhasil, sulit untuk tidak memenuhi tuntutan gerakan separatis dari bumi Aceh ini.(www.jakartapress.com)

Gerakan separatisme RMS juga menempuh upaya alternatif serupa yang mewujud dalam wadah bernama Forum Kedaulatan Maluku (FKM). FKM di Maluku melakukan berbagai upaya intersionalisasi persoalan domestik Indonesia di Maluku di mana, Ketua FKM, Alex Manuputty mengakui bahwa jaringan FKM yang aktif terdiri dari 50 (limapuluh) orang, tersebar di berbagai negara, seperti Australia, Amerika, Belanda, Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya. Saat ini gerakan RMS sedang merasa mendapatkan dukungan internasional yang berpusat di Belanda. Di luar mereka memiliki organisasi tingkat internasional yaitu Unrepresented Nations and Peoples Organizations (UNPO) yang bermarkas di Belanda, dimana para pimpinan mereka sering melakukan pertemuan.

4.4.1 Upaya Internasionalisasi Melalui Pengadilan Den Haag

Dalam kaitan ini, manuver yang dilakukan oleh para aktivis RMS telah "selangkah lebih maju" untuk setidaknya memberikan efek kejut bagi pemerintah Indonesia atau bahkan masyarakat Indonesia. Manuver yang dilakukan oleh RMS telah menunjukkan bahwa sel-sel gerakan separatis di Indoensia tidak pernah mati dan berusaha selalu mencari simpati public, baik public nasional maupun internasional.

Hal tersebut adalah masuknya gugatan aktivis RMS ke pengadilan HAM di Belanda Proses hukum ini membuat Presiden SBY membatalkan kunjungan kenegaraan ke Belanda, yang seyogianya berlangsung pada 6-8 Oktober 2010. Kebatalan kunujungan tersebut membuat Tuan rumah Belanda dibuat repot akibat pembatalan itu. Ini mengingat pihak Kerajaan, sejumlah kementerian, universitas, dan lembaga-lembaga yang seharusnya akan dikunjungi sudah mempersiapkan diri sampai ke hal-hal kecil. Pengadaan makanan, penyediaan bunga, pengamanan di bandara, dan semua pelayanan lain sudah siaga. Untuk semua persiapan itu kerugian yang muncul bukan hanya soal materiil, tetapi juga waktu. Hal itu juga membatalkan semua kesempatan atau peluang kerja sama bilateral.

Pemerintah Indonesia menganggap kondisi politik di Belanda masih belum konklusif dan belum bersih dari proses hukum meskipun pengadilan telah menolak gugatan RMS. "Masih ada beberapa gugatan lain yang belum diputus oleh pengadilan," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto," Misalnya, masih ada tuntutan RMS kepada Pemerintah Belanda agar meminta penjelasan kepada Pemerintah RI tentang makam almarhum pencetus dan sekaligus pemimpin RMS, Dr R

Soumokil", Gugatan lain adalah tuntutan kepada Pemerintah Belanda agar dilakukannya dialog antara Pemerintah RI dan RMS tentang penentuan nasib sendiri (self determination) Maluku," Oleh sebab itu, pemerintah belum menjadwalkan kembali rencana kunjungan Presiden ke Belanda. Menurut Wattilete, "Saat ini ada 93 orang ditahan karena mendukung RMS. Amnesti Internasional dan Human Right Watch telah melaporkan kasus ini." RMS juga meminta Indonesia menghentikan penahanan dan dugaan penyiksaan para pendukung RMS di Indonesia. Tuntutan kedua, RMS mempertanyakan lokasi makam salah satu pendiri RMS, Chris Soumokil. Soumokil, bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur itu tewas pada 1966 dalam eksekusi yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Jangan beri RMS ruang Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah juga memberi penjelasan soal pembatalan itu. "Melalui pembatalan kunjungan itu, Pemerintah RI mengharapkan Belanda tidak menjadikan wilayahnya sebagai ruang gerak yang bebas bagi kelompok yang merongrong keutuhan wilayah Indonesia. Aktivitas demikian dinilai berpotensi mengganggu hubungan bilateral RI-Belanda," Faizasyah juga menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak hendak mendikte Belanda. "Kita hanya ingin memastikan bahwa ruang gerak kelompok ini lebih diperhatikan. Tidak sepatutnya jika dalam hubungan antarnegara diberi ruang yang cukup besar bagi organisasi yang merongrong hubungan bilateral. Kita berharap ada proses pembelajaran dari penundaan ini," selain itu surat soal pembatalan dari Presiden Yudhoyono kepada Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende sudah diserahkan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Surat tersebut menjelaskan alasan rasional

pembatalan kunjungan. Isi surat itu juga mengatakan, penjadwalan kembali kunjungan Presiden baru dilakukan setelah memerhatikan kelanjutan proses pengadilan tuduhan pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia yang dituduhkan RMS. (Sumber : jakartapress.com diakses pada tanggal 8 Juli 2011).

4.4.2 RMS dan OPM Bergerak Bersama

Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) disinyalir merupakan jaringan multinasional untuk merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua Presidium ICMI Muda, Iqbal Parewangi di Makassar, Minggu 08 Juli 2010 menuturkan bahwa terdapat indikasi kuat adanya skenario besar yang dilakukan oleh jaringan multinasional di balik gerakan separatis RMS dan OPM, baik itu untuk tujuan disintegrasi bangsa Indonesia secara menyeluruh, mendorong pemisahan diri daerah-daerah tertentu dari kedaulatan NKRI maupun untuk berbagai tujuan lain, termasuk penjajahan ekonomi, sosial dan politik. Menurut dia, hal ini penting dicermati mengingat Maluku dan Papua merupakan pintu gerbang strategis bagi kepentingan penjajahan dan pengendalian multinasional terhadap Indonesia. (Sumber : jakartapress.com diakses pada tanggal 3 Juli 2011)

Adapun indikasi dari gerakan yang diperlihatkan RMS dan OPM tersebut yakni pertama, bersama GAM dan Fretilin, RMS dan OPM memiliki wadah tingkat internasional yaitu Unrepresented Nations and Peoples Organizations (UNPO) yang bermarkas di Belanda, dimana para pimpinan mereka sering melakukan pertemuan.

Wadah koordinasi tingkat internasional tersebut menunjukkan gerakan separatis di Indonesia tidak berdiri secara terpisah. Kedua, lanjut Iqbal, kehadiran Sekretaris I Kedubes Amerika Serikat serta utusan Australia, Inggris dan negara asing lainnya pada Kongres Rakyat Papua yang berlangsung tanggal 29 Mei-4 Juni 2000 dimana kongres tersebut menggugat penyatuan Papua ke dalam NKRI yang dilakukan pemerintah Belanda, Indonesia dan PBB di masa Presiden Soekarno (Sumber : http://www.indonesianvoice.com/ diakses pada tanggal 3 Juli 2011).

Melalui Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang disiarkan dari Washington DC pada tanggal 29 Juli 2005, pemerintah Amerika Serikat memang menyatakan tidak mendukung pemisahan diri Papua dari Indonesia. Namun demikian, persetujuan mayoritas Kongres Amerika Serikat terhadap RUU 2601 itu sendiri menunjukkan sisi lain dari sikap Amerika Serikat terhadap gerakan pelepasan diri Papua dari Indonesia. (Sumber : jakartapress.com diakses pada tanggal 3 Juli 2011).

Gerakan separatisme RMS juga menempuh upaya alternatif serupa yang mewujud dalam wadah bernama Forum Kedaulatan Maluku (FKM). FKM di Maluku melakukan berbagai upaya intersionalisasi persoalan domestik Indonesia di Maluku di mana lanjut Iqbal, Ketua FKM, Alex Manuputty mengakui bahwa jaringan FKM yang aktif terdiri dari 50 (limapuluh) orang, tersebar di berbagai negara, seperti Australia, Amerika, Belanda, Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya.

ICMI menilai bahwa pengibaran bendera RMS di hadapan Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2007 di Ambon pada 29 Juni 2007 dan pengibaran bendera Bintang Kejora Organisasi Papua Merdeka (OPM)

pada acara pembukaan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua di Jayapura, Papua, tanggal 3 Juli 2007 rupakan tindakan makar yang bertujuan menjatuhkan kewibawaan pemerintah RI dan merongrong kedaulatan bangsa Indonesia dan NKRI. "Mereka mendesak TNI/Polri untuk mengusut tuntas peristiwa makar 29 Juni 2007 RMS dan peristiwa makar 3 Juli 2007 OPM serta seluruh peristiwa makar yang dilakukan RMS dan OPM dan menindak tegas seluruh pelaku dan pendukungnya termasuk mendesak pemerintah RI agar menolak campur tangan negara asing terhadap upaya menumpas tuntas gerakan separatis RMS dan OPM". Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan TNI/Polri terkesan melakukan pembiaran terhadap gerakan RMS dan OPM. "Pembiaran serangkaian peristiwa makar yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkelanjutan oleh RMS dan OPM tanpa penyikapan secara tegas dan tuntas oleh pemerintah dan TNI/Polri menunjukkan lemahnya penegakan kedaulatan bangsa Indonesia dan NKRI" (Sumber : http://www.indonesianvoice.com/ diakses pada tanggal 3 Juli 2011).

Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) disinyalir merupakan jaringan multinasional untuk merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu pembiaran ini tidak boleh dilanjutkan, karena hal tersebut akan merongrong kewibawaan pemerintah. Pembiaran juga akan memunculkan penilaian negatif bahwa pemerintah bersikap mendua terhadap separatisme dan terorisme. Demikian pula terhadap terorisme yang acapkali dituduhkan memiliki keterkaitan dengan aktivis Islam, selalu sigap disikapi dan ditumpas sementara terhadap separatisme RMS dan OPM yang sudah jelas keberadaan, gerakan, jaringan

dan tujuannya, dibiarkan berlarut-larut. Gerakan RMS dan OPM ini merupakan bentuk terorisme yang mengancam ketenteraman manusia, separatisme merongrong kedaulatan bangsa. Separatisme merupakan terorisme terhadap kedaulatan suatu bangsa dan negara. Pembiaran tersebut hanya akan menimbulkan keretakan diantara pilar-pilar strategis penegak kedaulatan NKRI. Munculnya saling tuding dan silang pendapat secara tajam diantara TNI, Polri dan Badan Intelijen Nasional (BIN), terkait siapa yang harus bertanggungjawab terhadap peristiwa pengibaran bendera RMS di depan Presiden Republik Indonesia di Ambon, merupakan salah satu bentuk keretakan NKRI.

4.5 Belanda dan eksistensi RMS (Republik Maluku Selatan) dibalik setiap aksi penentangan terhadap pemerintah Indonesia

Setengah abad telah berlalu sejak Indonesia melepaskan diri dari penjajahan Belanda. dua negara yang tak terpisahkan satu sama lain selama lebih dari 300 tahun dalam bentuk hubungan kolonialisme itu-kini mengalami perkembangan yang saling berbeda sejak perpisahan keduanya (secara *de facto*) tahun 1949. Belanda yang praktis tidak memiliki kekayaan alam namun memiliki jiwa pedagang yang ulet tumbuh menjadi kekuatan ekonomi andal di Eropa Sementara Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam dan sumber daya manusia yang melimpah, mayoritas rakyatnya tetap saja miskin.

Tak sedikit pihak yang menuding terlalu lamanya penjajahan Belanda sebagai biang keladi salah kaprahnya manajemen pembangunan Indonesia, mental korup para penguasanya, pengaruhnya pada sistem ketatanegaraan serta hukumnya, fungsi tentara

yang lebih dititikberatkan pada keamanan domestik (kamtibnas) dan bukannya pertahanan terhadap bahaya/ancaman dari luar. Sebaliknya, tak sedikit pula orang Belanda yang berpendapat bahwa di antara bangsa penjajah sedunia, Belanda adalah yang terbaik dalam memperlakukan jajahannya (misalnya dibandingkan Jepang). Banyak orang Belanda percaya sebagai penguasa kolonial mereka sangat disukai bangsa pribumi Indonesia, juga bahwa mereka telah memberikan nilai-nilai terbaik untuk Indonesia. Bagi Belanda, masa penjajahan di Indonesia dilukiskan sebagai tempo doeloe, istilah yang mengacu pada perasaan nostalgia romantis. Ada juga orang Belanda yang kritis terhadap sejarah kolonial di Indonesia. Tetapi, pada umumnya masyarakat Belanda cenderung segan untuk diajak berdiskusi, terutama mengenai keberadaan Belanda di Indonesia pada kurun waktu antara tahun 1945-1949.

Luka psikologis ini yang membuat hubungan Indonesia-Belanda pasca kemerdekaan menjadi naik turun. Kondisi ini diperparah dengan masih eksisnya gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Belanda. Meski kekuatannya sejauh ini dianggap kecil, namun seringkali dimanfaatkan pihak tertentu di Belanda untuk mendiskreditkan Indonesia. Belum hilangnya kerikil-kerikil yang mengganggu hubungan Indonesia-Belanda, akibat kurang masksimalnya kinerja diplomat RI di Belanda. Masalah kemerdekaan RI di Belanda serta sikap Indonesia terhadap RMS tidak pernah jelas.

Hubungan luar negeri Indonesia – Belanda kedepannya akan sulit menemukan babak baru karena faktor sejarah yang akan selalu dominan, baik itu karena masa penjajahan Belanda yang berabad-abad dan masalah gerakan separatis RMS yang

sampai sekarang belum terselesaikan, sehingga kedepannya hubungan luar negeri Indonesia-Belanda akan selalu berada dibawah bayang sejarah, yang menyebabkan kedudukan Indonesia tidak akan sejajar dengan Belanda karena Indonesia selalu berada dibawah tekanan Belanda, dimana posisi Belanda akan selalu berada di atas Indonesia, Indonesia tidak akan mampu menaklukan pengaruh Belanda baik dalam urusan dalam negeri Indonesia maupun dalam hubungan luar negeri Indonesia-Belanda. Pada hal dalam suatu hubungan bilateral posisi kedua negara yang menjalin hubungan dan kerjasama adalah sama karena saling membutuhkan dan menguntungkan. Tetapi hal tersebut nampaknya tidak terjadi dalam hubungan luar negeri Indonesia-Belanda, keuntungan hanya terdapat pada pihak Belanda dan Indonesia lebih sering dipermalukan mengenai masalah RMS di Belanda yang menyangkut harga diri bangsa.

Eksisnya gerakan separatis RMS di Belanda secara tidak langsung akan berdampak bagi hubungan bilateral kedua negara karena walaupun tidak diakui secara langsung oleh Belanda, Belanda terkesan memelihara gerakan separatis tersebut dinegaranya. Kebebasan yang diberikan Belanda bagi RMS membuat gerakan tersebut semakin berani untuk menentang pemerintahan Indonesia melalui aksi penentangan terhadap pemerintah Indonesia. Hal tersebut menimbulkan perspektif dari sebagian masyarakat Indonesia bahwa RMS merupakan negara boneka bentukan Belanda yang masih ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena ketidak tegasan Belanda terhadap RMS. Adapun perspektif lain yaitu kurang maksimalnya kinerja para pemerintah RI dan diplomat RI yang berada di Belanda untuk

menyelesaikan masalah RMS tersebut lewat jalur Diplomasi baik dengan pemerintah Belanda dan juga pemerintah pengasingan RMS di Belanda.

Sebagai sebuah negara yang berdaulat perlu mengambil tindakan tegas kepada pemerintah kerajaan negeri Belanda, yang membiarkan wilayah kedaulatannya di jadikan basis oleh kelompok yang anti Indonesia. Dalam konteks ini serupa halnya dengan meronrong kewibaan kedaulatan Indonesia, padahal negeri Belanda sudah mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah Maluku. Bertitik tolak dari itu, maka semestinya negeri Belanda tidak membolehkan wilayahnya dijadikan tempat bagi kelompok-kelompok RMS yang nyata-nyata bermusuhan dengan Indonesia, salah satu negara sahabat Belanda. Namun bagaimana mereka akan mengambil tindakan tegas terhadap berbagai aktifitas kaum separatisme RMS di Belanda, sementara Indonesia sendiri mengabaikannya.

Tampaknya cita-cita utama bangsa Indonesia yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, selamanya akan terusik dengan masih adanya Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (RMS) di Belanda. Selama RMS belum diberantas, mereka akan selalu berusaha untuk menentang pemerintah Indonesia dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Tidak dapat dipungkiri aksi-aksi para aktivis RMS selalu membuat pemerintah Indonesia kaget dan kewalahan. Mereka akan selalu berusaha untuk mengumpulkan kekuatan untuk melawan Indonesia, untuk itu pemerintah Indonesia jangan hanya memandang sebelah mata atas kelompok tersebut. Mereka harus dibasmi sampai pada akarnya.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menentukan langkah-langkah kebijakan mengatasi masalah separatisme yang berkembang di Indonesia, guna menciptakan stabilisasi situasi dan kondisi dalam negeri. Manuver yang dilakukan oleh RMS telah menunjukkan bahwa sel-sel gerakan separatis di Indoensia tidak pernah mati dan berusaha selalu mencari simpati public, baik public nasional maupun internasional. Eksisnya keberadaan RMS di negeri Belanda menjadi pertanyaan besar. Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyarankan sebaiknya Presiden mempertimbangkan pembatalan, bukan sekadar penundaan keberangkatan ke Belanda. mensinyalir ada peran Belanda di balik eksistensinya RMS hingga saat ini. "Eksistensi RMS di Belanda sampai sekarang ini mengesankan "dipelihara" atau setidaknya diberi angin oleh pihak Belanda," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (Sumber : *VIVAnews.com,* di akses pada tanggal 29 Juli 2011).

Pengajuan tuntutan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Presiden SBY adalah salah satu contoh keberanian dan eksistensi dari dari kelompok separatisme RMS ini dibawah payung Belanda. Bagaimana tidak pengajuan tesebut sengaja diajukan bertepatan dengan kunjungan SBY ke Belanda Meski pengadilan kemudian menolak, tentu saja hal itu mempermalukan pemimpin dan rakyat Indonesia. Kasus itu menambah panjang masalah dalam hubungan Indonesia-Belanda. Kita berpikir, tidak ada perlindungan bagi gerakan itu di Belanda. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Priyo menyarankan adanya diplomasi tingkat tinggi untuk mengklarifikasi peristiwa yang sebenarnya terjadi di Den Haag. Menurut Priyo Budi, diplomasi tingkat tinggi diperlukan untuk mengklarifikasi semua rangkaian peristiwa

ini. Karena, peristiwa ini bisa mengancam sendi-sendi hubungan kedua negara. Priyo mengecam segelintir orang di Belanda yang mengajukan gugatan untuk menangkap Presiden RI. "Saya sangat menyesalkan tindakan tidak tahu diri sekelompok orang Belanda yang masih mengumbar sikap sebagai tuan besar menghadapi kita sebagai rakyat Indonesia," kritik politisi Golkar ini (Sumber : jakartapress.com diakses pada tanggal 3 Juli 2011).

Namun jika kita perhatikan, nampak Indonesia terbukti kewalahan menghadapi isu separatis ini. Timor Timur telah membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia memang “rapuh” dalam menghadapi isu separatis tersebut. Aceh melalui gerakan Aceh Merdeka (GAM), telah pula berhasil memaksa Indonesia untuk menjadikan bangsa Aceh sejajar dengan bangsa Indonesia yang akhirnya melahirkan kesepakatan Helsinski yang terkenal sekaligus kontroversial itu. Mengapa Indonesia lebih rapuh dalam menghadapi isu separatis dibandingkan dengan negara-negara lain.

Ada beberapa alasan yang membuat Indonesia relatif rapuh menghadapi gerakan separatis dibandingkan isu serupa di negara-negara lain. Pertama, karena etnis Indonesia yang rawan untuk menuntut kemerdekaan memang berjumlah lebih banyak ketimbang etnis di negara-negara lain. Kedua, adanya strategi internasionalisasi terhadap isu separatis. Ketiga, lemahnya pemerintah Indonesia baik didalam negeri maupun ditingkat internasional dalam menghadapi soal ini.